

DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN MELALUI PENDIDIKAN ISLAM

(Kajian Tematik Terhadap Ide-ide Deradikalisasi Paham Keagamaan)

Oleh :

Aron Gemilang Elyasar

NPM: 20130720161, E-mail: arongemilang@gmail.com

Dosen Pembimbing :

Nurwanto, S.Ag., MA., M.Ed.

Alamat: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirta, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Website <http://www.umy.ac.id>

Abstract

Nowadays, religious radicalism becomes the attention of many people particularly among Muslims. This is caused by the effects of religious radicalism. Religious radical groups often misuse the meaning of jihad to legitimate violence leading to unrest in social life. It finally becomes a bad stigma for all Muslims. In fact, Islam doesn't teach or call for da'wah in radical way. Therefore, prevention of religious radicalism needs to be done.

This research discussed the deradicalization program run by government through BNPT, and investigated deradicalization concepts according to Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. This research also discussed both the concepts and perspectives of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama about the deradicalization program as well as to investigate how radicalism is resolved through Islamic education in those institutions.

Substantively, this is a library research focusing not only on important issues of deradicalization and its concepts but also attempting to find facts and great ideas about deradicalization from the government agencies such as BNPT and Islamic organization such as Muhammadiyah and Nahdatul Ulama. The perspectives of Muhammadiyah and Nahdatul Ulama about deradicalization have been generally transformed in their environment reaching to the Islamic education field. In those two institutions, Islamic education becomes an object of study.

The findings of the research indicated that BNPT, Muhammadiyah and Nahdatul Ulama have various ways, concepts, strategies, and instruments of deradicalization used in fighting terrorism and radicalism.

Key words: *Deradicalization, Moderation, Islamic Education, BNPT, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama*

PENDAHULUAN

Konflik keagamaan di Indonesia saat ini, sudah mulai memasuki babak baru. Belum lagi ditambah dengan adanya konflik sosial yang terjadi ditengah masyarakat menambah panasnya situasi sekarang. Jika kita tilik kembali kasus yang terjadi di Ambon, Aceh maupun daerah lain, menjadi contoh bahwa kerawanan sosial isu keagamaan bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Hal tersebut sering digunakan oleh mereka (para kelompok radikal) sebagai pemantik konflik (Zuhdi, 2010:87). Persoalan yang mengundang konflik komunal dimasyarakat sangat ditunggu oleh para kalangan radikal. Hal tersebut dijadikan sebagai alasan untuk berkonfrontasi baik kepada negara maupun kelompok tertentu yang dianggapnya bersebrangan dengan kelompoknya yang tak jarang membawa simbol-simbol agama (Azca, 2013:18). Mereka memanfaatkan isu-isu keagamaan sebagai cara memobilisasi masa dalam melakukan aksinya. Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting saat ini khususnya bagi umat Islam. Selain sederet kasus Terorisme yang terjadi menyebabkan islam dicap sebagai agama yang penuh kekerasan dan teror. Walaupun anggapan itu mudah untuk dimentahkan, faktanya para pelaku teror di Indonesia adalah Muslim yang berhaluan ekstrem (Rokhmad, 2012:81).

Secara sederhana, radikalisme agama adalah bentuk fanatisme terhadap suatu paham serta menganggap kelompoknya paling benar dan kelompok tak sepaham salah (Masduqi, 2012:2). Yusuf Qardhawi menjelaskan Radikalisme adalah sikap yang melampaui batas "*Ghuluw*" yaitu sikap yang berlebih-lebihan dalam hal keagamaan dengan cara atau sikap yang ekstrem untuk menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat (Qodir, 2013:87).

Distorsi paham keagamaan salah satu penyebab munculnya para kelompok radikal. Mereka menafsirkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadits secara parsial (sepotong-potong) mengakibatkan kekakuan dalam memahami ajaran agama

termasuk dalam hal ini mengenai Jihad. Hal tersebut membuktikan bahwa pemahaman atau logika jihad yang keliru atau sempit tentang ajaran Islam yang selama ini diajarkan atau dianutnya, disalahgunakan dalam memperjuangkan aspirasinya dengan cara-cara kekerasan.

Pemerintah melalui BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dengan berupaya menanggulangi paham kelompok radikal. Namun, masih banyak hal yang dinilai kurang dalam program tersebut. Perlu adanya *treatment* khusus maupun pendekatan yang lebih efektif. Maka, pemerintah kemudian memunculkan sebuah program deradikalisasi sebagai upaya menanggulangi radikalisme. Namun, konsep deradikalisasi sendiri memiliki keterkaburan makna dari sisi pandangan dari tiap-tiap kalangan tentu, juga memiliki pemahaman yang berbeda. Dalam hal inilah peran penting lembaga-lembaga kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) ikut berperan penting dalam menanggulangi dampak radikalisme atau ekstrimisme.

Muhammadiyah berpandangan bahwa, salah satu faktor merebaknya radikalisme hingga terorisme adalah adanya kesenjangan pendidikan. Masih banyaknya anak putus sekolah kemudian dalam lingkungannya yang kemudian dijadikan sasaran para kelompok radikal, sehingga mereka terekrut dan terdoktrin yang sebelumnya tidak memiliki pendidikan agama yang baik sebagai pembanding (Sucipto, Ramly, 2012:68). Muhammadiyah berusaha mengajarkan bagaimana menjadikan Islam yang damai, Islam tengahan, serta membentuk dan mewujudkan sebuah komunitas Islam yang moderat tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Sama halnya dengan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama berperan aktif dengan strategi dakwah Islam kultural yang mengedepankan bahwa Islam hadir di negara ini dengan penuh kedamaian dengan mengadaptasi nilai-nilai lokal. Selain Hal tersebut Pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam yang *rahmatan lil alamin* dan toleran misal, dalam materi pembelajaran disekolah lembaga NU mengajarkan materi tentang Aswaja (*Ahlus Sunah Wal Jamaah*) Yang mengajarkan nilai-nilai toleran dan keterbukaan dalam beragama.

Dari pemaparan diatas, bisa menjadi refleksi bagi kita. Sejatinya, masalah tersebut bermuara pada pada hal-hal mendasar. Ketidak pahaman umat muslim serta tidak menjalankan syariat Islam secara kafah menjadi salah satu faktor. Memaknai keagamaan yang salah dan kurang mendalam. Keterbelakangan pendidikan Islam menjadi salah satu faktor utama penyebab hal itu terjadi. Mereka, mudah sekali ikut paham-paham asing yang tidak sesuai dengan nilai ajaran budaya dan Islam yang sejati. Sehingga mereka mudah terombang ambing, ditambah dengan factor masalah lainnya yang membuat mereka semakin termotivasi. Maka, dari ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) diharapkan mampu meng-*counter* paham-paham radikal walaupun, ada perbedaan konsep mengenai deradikalisasi itu sendiri. Hal inilah yang menarik untuk dikaji mengenai konsep deradikalisasi yang mereka lakukan serta, strategi dalam upaya deradikalisasi dalam paham keagamaan. Maupun implikasinya bagi dunia pendidikan Islam yang mereka kembangkan.

Tulisan ini ingin menjelaskan mengenai bagaimana konsep deradikalisasi yang diipahami dan dikembangkan menurut BNPT, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Selain itu, tulisan ini juga ingin menjelaskan apa persamaan dan perbedaan (konsep, ide, dan strategi) deradikalisasi dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama melalui Pendidikan Islam. Tulisan ini juga mencoba menjelaskan bagaimana sikap Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam mendidik umat, untuk menjadi Islam yang tengahan/moderat serta adab/akhlak dalam berperilaku terhadap sesama maupun yang berbeda sekalipun melalui cara dan metode yang mereka kembangkan, khususnya melalui Pendidikan Agama Islam.

KERANGKA TEORI

a. Radikalisme

Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, *radix*, yang berarti akar. Ia merupakan paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Rodin, 2016:33). Radikal, dalam

ilmu filsafat berasal dari kata *radix* yang berarti berakar, mendalam, koreprehensif, mengakar. Berfikir radikal berarti berfikir mendalam, pada akhirnya, tajam, kritis. Kemudian, makna radikalisme adalah sebuah proses mewujudkan seseorang anak didik yang belajar secara tajam dan mendalam. Dalam hal ini, istilah radikal maupun radikalisme masih umum dan tidak ada makna yang terkait dengan doktrin agama (Idris, 2017: 30). Hanya saja *image* yang ada masyarakat istilah radikal itu telah mengalami peleburan dan pergeseran makna pada hal yang lebih sempit. Istilah radikalisme merupakan paham yang berupaya melakukan perubahan secara menyeluruh, cepat dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang kemudian mengatasnamakan agama, membalut perilaku kekerasan dengan identitas agama dengan mengemas aksi dengan narasi keagamaan. Maka, munculah anarkisme dibungkus dengan istilah Jihad.

Radikalisme dalam ilmu sosial juga dilihat sebagai cara pandang melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan keadaan realitas sosial yang terjadi di lingkungannya atau ideologi yang dipahami. Radikal dan radikalisme sebenarnya merupakan konsep netral dan tidak bersifat melecehkan. Perubahan radikal bisa dilakukan melalui cara damai dan persuasif tetapi bisa juga dengan kekerasan. Dalam hal ini ada dua bentuk macam kekerasan yaitu, kekerasan fisik (penyerangan, pemukulan) dan simbolik atau wacana lebih kepada (provokasi, stigmatisasi, *hate speech*) hal tersebut memungkinkan potensi menuju kekerasan fisik (Hasani, *et.al.*, 2011:19). Para peneliti menyimpulkan bahwa ada dua fokus yang berbeda; *Pertama, On violent radicalization* yaitu, suatu tindakan dengan menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. *Kedua, On a broader sense of radicalization* yaitu, dalam arti lebih luas yaitu suatu tindakan aktif dan cepat, melakukan sebuah perubahan yang masif pada masyarakat, baik menggunakan cara kekerasan maupun tidak menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Aslam, Othman dan Rosili, 2016: 155)

b. Deradikalisasi

Secara Umum Deradikalisasi dari berbagai literatur telah banyak menjelaskan yang pada intinya adalah Deradikalisasi merupakan tindakan mencegah eskalasi lebih lanjut dari dampak radikalisme baik dampak pemahaman maupun perilaku radikal. selain itu menciptakan kondisi yang kondusif dan mengutamakan cara dialogis dengan individu maupun kelompok radikal (Ahmad, 2016:17). Morris juga menyebutkan bahwa deradikalisasi paham keagamaan merupakan langkah yang dilakukan mulai dari dialog antara individu yang akan deradikalisasi. Dalam hal ini, usaha deradikalisasi dengan jalan dialog berusaha membujuk individu tersebut melalui diskusi agama maupun debat, agar meninggalkan ideologi ataupun pemahaman yang radikal (Morris et.al, 2010:3-4). lebih lanjut Ahmad menjelaskan bahwa, deradikalisasi merupakan sebuah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh otoritas untuk mereduksi dan meyakinkan kelompok maupun individu yang telah menjadi radikal ekstrem agar kembali dan melepaskan diri dari pemahaman ekstrem dalam beragama (Ahmad, 2016:17).

Dari sisi sosial psikologi deradikalisasi merupakan sebuah proses dimana individu, berkomitmen mengurangi pengaruh paham radikal, sehingga berkurang resiko terkena paham radikal maupun terlibat dalam aktivitas kekerasan (Feddes and Galluci, 2015:3). Deradikalisasi juga dapat dipahami sebagai proses mengubah sikap dan perilaku seseorang yang telah terpapar paham radikal untuk menolak kekerasan sebagai tujuan ideologis, agama atau politik yang dapat membahayakan keamanan nasional, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Aslam dkk menjelaskan bahwa deradikalisasi adalah sebuah proses mengembalikan ideologi dan melegitimasi penggunaan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu (Aslam, Othman dan Rosili, 2016: 155-156).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif dengan berdasar pada kajian pustaka atau *library reseacrh*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap cara

pandang yang berbeda, dalam konsep pemahaman, serta ide-ide mengenai deradikalisasi baik dari BNPT, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Maka, dalam hal ini peneliti mencoba menyuarakan berbagai hasil pemikiran dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama yang terkait dengan penelitian ini, Data yang diperoleh melalui pengumpulan data-data dari buku, dokumen-dokumen, jurnal, surat kabar baik cetak maupun online, e-book, dan lainnya yang dilihat memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berusaha memahami, mengkategorisasi persamaan dan perbedaan mengenai konsep deradikalisasi dari BNPT, Muhammadiyah dan NU. Dan kemudian berusaha mengetahui strategi dan dampak deradikalisasi melalui pendidikan Islam dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan menganalisa dan menyajikan fakta dari data yang diperoleh secara sistematis mengenai konsep deradikalisasi.

PEMBAHASAN

a. Upaya Deradikalisasi

Perkembangan aksi terorisme dan radikalisme sejak pra-kemerdekaan hingga reformasi terus mengalami perubahan baik dalam bentuk tindakan, motif, maupun bentuk strategi yang dilakukan dalam merekrut anggotanya (Ismail, 2015:4). Masa orde lama kebijakan/upaya penanggulangan terorisme lebih pada operasi militer. Pada masa orde baru juga lebih kepada operasi intelejen yang berdasarkan pada UU Subversif. Pada era reformasi, dimana kebebasan, serta, Hak Asasi Manusia juga turut mempengaruhi kebijakan dan strategi yang dilakukan. Dalam masa tersebut hingga saat ini, penanggulangan terorisme dan gerakan radikal lebih mengedepankan pada aspek hukum berdasar UU No 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasca tragedi Bom Bali I 2002 (Othman dan Brosili, 2016:156). BNPT berperan penting dalam *counter terrorism* termasuk juga merumuskan kebijakan, strategi dan program skala nasional maupun internasional. Maka, Program deradikalisasi di Indonesia diamanatkan kepada

BNPT untuk merancang program maupun koordinasi pelaksanaan pencegahan, pemberantasan ideologi radikal melalui deradikalisasi.

Berbagai negara telah mengembangkan model deradikalisasi sesuai dengan keadaan masing-masing negara. Negara-negara seperti Timur Tengah Arab Saudi, Maroko, Irak, hingga Yaman bahkan negara-negara seperti Jerman Inggris dan Norwegia pun telah menjalankan program deradikalisasi. Setiap negara memiliki karakteristik program yang berbeda dan cara penanggulangan yang berbeda pula. Hal tersebut terjadi karena setiap kasus memiliki latar belakang masalah tersendiri dari setiap negara. Namun, Pada dasarnya deradikalisasi memiliki kesamaan karakteristik di beberapa negara (Zuhri, 2017: 104). berikut beberapa keasamaan karakteristik di beberapa negara: 1) Pelibatan maupun kerjasama dengan *civil society*. 2) Pelaksanaan khusus pada tahanan kasus terorisme ataupun hal yang berkaitan. 3) Melalui program pendidikan deradikalisasi. 4) Dialog lintas budaya. 5) Pengupayaan keadilan sosial, hulum dan ekonomi. 6) Kerjasama internasional dalam *counter terrorism*. 7) Pencegahan *cyber terrorism*. 8) Pengeluaran kebijakan-kebijakn (perangkat hukum). 10) Rehabilitasi para pelaku. 11) Pelatihan maupun pengkualifkasian para pelaku pelaksana kontra-radikalisas.

Indonesia sendiri sama halnya dengan negara-negara lainnya, program deradikalisasi bertujuan untuk menetralsisir dasar-dasar ideologi radikal, militan, eksrimis (Noor dan Hayat, 2009:48). Sejauh ini program deradikalisasi yang sudah hampir berjalan beberapa tahun ini mampu meyakinkan para tahanan termasuk para pelaku Bom Bali dan melakukan kolaborasi, ikut terlibat dalam program deradikalisasi (Othman and Brosili, 2016:156). Secara keseluruhan semenjak 2005 program deradikalisasi menunjukkan keberhasilannya walaupun program tersebut hanya menangani para tahanan terorisme. Hal tersebut berdasarkan asumsi tren penurunan aksi terorisme dan informasi intelejen yang didapat dari para pelaku namun belum bisa menghasilkan hasil yang optimal. Maka penanganan juga perlu dikembangkan dimasyarakat secara umum sebagai bentuk pencegahan (Johnston, 2009:46-47).

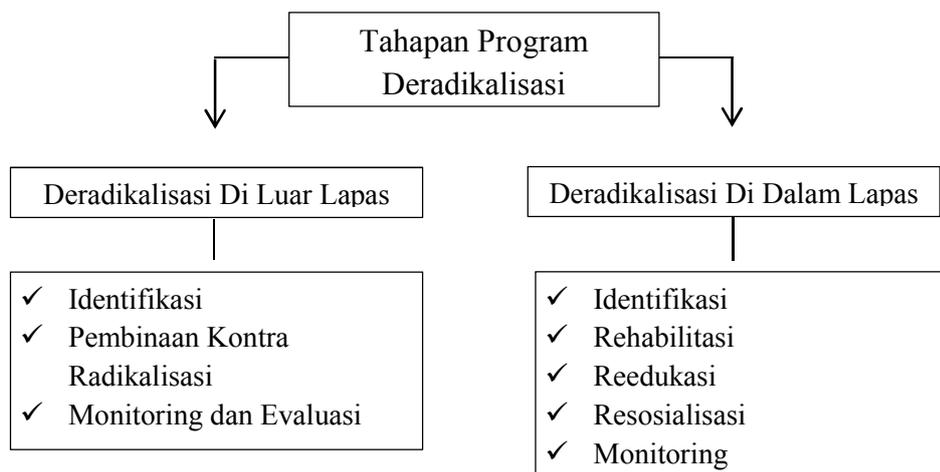
Dengan munculnya program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah mengajak masyarakat yang terpapar paham radikal terutama para tahanan teroris, keluarga serta jaringannya, agar terlepas dan kembali kepada esensi dalam kehidupan masyarakat yang sejalan dengan aturan agama dan negara (Idris, 2017:46) Program deradikalisasi diharapkan bisa menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya para penegak hukum maupun lembaga pemerintahan lainnya tetapi juga masyarakat dan elemen yang ada didalamnya. Maka diharapkan dengan adanya program deradikalisasi yang baik dan benar tentunya dengan pemetaan masalah baik dari hulu hingga hilir, sehingga bisa tepat sasaran (Rabasa et.al., 2010:11).

Sejak tahun 2011, BNPT sebagai pelopor utama dalam hal ini mempunyai tugas yang meliputi, kegiatan penangkalan dan penanggulangan, baik itu deteksi dini, pencegahan dini, pengungkapan, rehabilitasi para pelaku, dan juga deradikalisasi (Rokhmad, 2014: 31). Dalam hal ini, deradikalisasi dititik beratkan pada dua hal yaitu pencegahan dan penindakan. Pada ranah pencegahan lebih kepada deteksi dini atau pencegahan aksi agar bisa digagalkan. Pada ranah penindakan yaitu, berupa penangkapan baik itu para pelaku yang kan melakukan aksi maupun pasca melakukan aksi yang kemudian menjalani proses hukum (Johnston, 2009:39).

Gambar 1.1

Tahapan Deradikalisasi

Sumber: Buku Deradikalisasi (Hikam, 2016: 142-44)



Implementasi program deradikalisasi terbagi dalam dua target/alur; Pertama, pada tahap deradikalisasi di dalam lapas, para pelaku yang sudah menjalani proses hukum, akan dilakukan identifikasi baik tersangka sendiri, keluarga, serta jaringan pelaku. Setelah proses identifikasi selesai dilanjutkan dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi dilakukan dengan pola sistematis untuk upaya perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif tidak ekstrem kanan ataupun kiri. Kemudian, dilanjutkan pada tahap reedukasi yang memberikan pemahaman ulang terhadap napi teroris dan keluarga mengenai ajaran agama yang selama ini salah pahami. Setelah proses tersebut dijalani para napi teroris akan dikembalikan ke Masyarakat dengan mempersiapkan para mantan teroris agar bisa dan mampu berinteraksi dengan baik dan hidup berdampingan ditengah masyarakat. Setelah semua proses itu dilewati maka dengan kembalinya mereka ke tengah masyarakat perlu dilakukan monitoring untuk melihat perubahan pemahaman dan sikap agar diterima masyarakat kembali.

Kedua, tahap kedua yakni, deradikalisasi diluar lapas. Pada tahapan ini, deradikalisasi yang tujuan utamanya adalah netralisasi ideologi radikal dan juga sebagai deteksi dini terhadap terorisme. Sehingga deradikalisasi pada tahap kedua ini lebih kepada soft power sehingga program ini ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat agar mampu mendeteksi sedini mungkin adanya bahaya atau ancaman ideologis yang disebarkan oleh para simpatisan maupun pendukung gerakan radikal. Selain itu, deradikalisasi memiliki 3 dimensi (Idris, 2017: 36-40):

1) Deradikalisasi sebagai strategi

Deradikalisasi sebagai upaya kontra radikalisasi dan disengagement. Kontra radikalisasi lebih kepada masyarakat secara umum. Sasaran utama adalah para kaum muda. Utamanya pada sekolah baik itu menengah hingga tinggi, maupun lembaga pendidikan agama lainnya. Hal tersebut sebagai langkah memberikan daya imun (daya tahan) masyarakat agar tidak mudah terpapar bujukan rayuan paham radikal anarkis. Sedangkan disengagement merupakan upaya menanggalkan paham radikal anarkis, melepaskan diri dari jeran ideologi negara agama dan tetap mengokohkan ideologi negara.

2) Deradikalisasi Sebagai Program

Deradikalisasi sebagai program yaitu program deradikalisasi secara nasional dan secara kelembagaan. Kedua rumusan tersebut dapat diperankan oleh semua kementerian dan lembaga. Dalam blueprint BNPT, deradikalisasi dirinci setiap kementerian dan lembaga yang dapat direalisasikan dalam program masing-masing. Dengan itu, BNPT berperan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dalam upaya pencegahan, koordinasi penegakan hukum dan peningkatan kerjasama internasional. Selain itu BNPT kemudian membuat *Grand Design* deradikalisasi sebuah upaya secara *holistik*. Dengan demikian koordinasi tersebut menjamin efektifitas dan kesinambungan program deradikalisasi.

3) Deradikalisasi Sebagai Institusi Kelembagaan

Deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan, pada akhir tahun 2010 BNPT sudah memiliki struktur deradikalisasi sebagai institusi direktorat, hal tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI No 46 Tahun 2010 bahwa direktorat deradikalisasi membawahi sub direktorat penangkalan dan sub rehabilitasi. Deradikalisasi dijadikan program unggulan dalam menanggulangi terorisme dengan dicantumkannya program deradikalisasi dalam naskah akademik perubahan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Dengan demikian mekanisme koordinasi mencakup dua komponen utama antara koordinasi antar kementerian/lembaga Negara dan juga lembaga non-pemerintahan. Hal tersebut juga disesuaikan dengan tugas fungsi, dan kewenangan masing-masing. Mulai dari rehabilitasi, reduksi, sampai pada resosialisasi.

Selain itu, BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi, secara spesifik, memiliki pencapaian dua tujuan utama. Pertama, agar kelompok inti dan militan meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya. Kedua, kelompok inti, militan dan pendukung moderasi paham-paham radikal mereka sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi-misi kebangsaan. (Zuhri, 2017: 106-109).

b. Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Muhammadiyah

Sebagai gerakan pembaharuan (*tajdid*), Muhammadiyah berusaha mengajak pada umat dalam memurnikan iman dan Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Muhammadiyah ingin mengajak umat kembali pada ajaran murni dengan merujuk teks asli Al-Qur'an dan sunah dengan pemahaman yang benar. Melalui dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam proporsi yang sebenarnya bukan dengan cara-cara paksaan dan kekerasan. Muhammadiyah dengan proyek *tajdid*-nya dengan membuka diri pada perubahan dan terus menerus memahami ulang doktrin keagamaan. Dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki Muhammadiyah di usianya yang sudah memasuki abad ke-dua Muhammadiyah tidak hanya sebatas fase kesinambungan organisasi, namun juga pada tahap lanjut aktualisasi kebaruan kreativitasnya. Posisi dan karakter Muhammadiyah sebagai gerakan *civil society* menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan yang mandiri namun tidak anti pemerintah. Muhammadiyah lebih berorientasi mengembangkan pada pola-pola kemitraan strategis dengan pihak manapun tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai gerakan *civil society* yang mandiri. (Ul-Haq, 2009:7). Maka tidak heran, jika Muhammadiyah tidak masuk dalam program Deradikalisasi. Tentu dalam hal ini Muhammadiyah mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa tidak ikut dalam program Deradikalisasi.

Muhammadiyah dalam hal ini menegaskan dalam sebuah kesempatan dalam acara seminar nasional "Moderasi Antitesis Radikalisme dan Deradikalisasi" di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa, Muhammadiyah tidak akan masuk dalam gerakan deradikalisasi (Republika, 3 April 2016). Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa, Muhammadiyah seratus persen menolak radikalisme dan ekstrimisme seperti terorisme dan tindakan teror, terlebih yang mengatasnamakan agama dan penyalahgunaan makna mengenai konsep Jihad. Memang tindakan kontra radikalisme dalam batasan tertentu harus dilakukan dan itu perlu. (Suara Muhammadiyah, 3 April 2016). Dengan konsep moderasi tersebut Dr Haedar

Nashir sebagai salah satu pembicara pada diskusi mengenai Fikih Anti Terorisme di Universitas Muhammadiyah Semarang juga menjelaskan bahwa, Muhammadiyah ingin menjelaskan konsep jihad secara menyeluruh sehingga tidak terjadi salah dalam memahami maupun disalahgunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang tertentu (Suara Merdeka, 3 Mei 2016). Maka dalam hal ini Muhammadiyah berusaha menciptakan rasionalitas publik, kedewasaan publik dan keberanian publik agar bisa menyikapi secara objektif dalam radikalisasi dan radikalisme.

Muhammadiyah beranggapan kekerasan tidak harus selalu dihadapi dengan kekerasan pula bukan hanya asal eksekusi mati di tempat tetapi harus melalui proses hukum yang adil tetapi juga dengan jalan yang *soft approach* atau *persuasif*. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti juga menyampaikan bahwa, agar program deradikalisasi agar lebih berorientasi pada substansi bukan hanya *project oriented*. Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa, Muhammadiyah mengatasi dan pencegahan paham radikalisme melalui dua ranah yaitu baik secara struktural maupun ranah kultural. Secara struktural Muhammadiyah melakukan upaya peneguhan ideologi Islam yang berkemajuan dan *Darul Ahdi Wa Syahdah*. Hal tersebut dilakukan mulai dari pimpinan Muhammadiyah hingga pada tingkat ranting. Dalam praktiknya, peneguhan ideologi tersebut melalui materi-materi pengajian maupun kaderasi maupun majlis, Ortonom, serta Amal Usaha Muhammadiyah. Kemudian, pada tataran Kultural, Muhammadiyah juga mentransformasikan dalam penyampaian materi-materi di sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi Muhammadiyah (Zuhri, 2017: 133-135).

Berdasarkan Putusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah BAB III poin ke-6 mengenai Konsep Pendidikan Muhammadiyah menyebutkan bahwa; *“memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan (tasawuh atau moderat) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati”*. Muhammadiyah berusaha mentransformasikan nilai-nilai Islam moderat melalui pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Misalnya, menyajikan

berbagai nilai positif dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai perdamaian. Disajikan pula pengetahuan dalam mencegah dan mengatasi potensi dan aktualisasi konflik maupun tindak kekerasan dimasukan disetiap jenjang kelas ataupun semesternya (Nurwanto, *et al.*, 2015: 61). Selain itu, aspek ajaran Islam yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam adalah ajaran mengenai akhlak. Muhammadiyah menganggap bahwa akhlak mahmudah sebagai aspek penting dalam membangun karakter individu sehingga bisa mencapai hubungan yang baik dengan Tuhanya maupun dalam komunitasnya seperti yang disebutkan dalam MKCH Muhammadiyah (Jainuri, 1992:38).

c. Pandangan dan Konsep Deradikalisasi Nahdlatul Ulama

NU merupakan sebuah organisasi Islam yang mewakili Islam tradisional, lebih akomodatif terhadap tradisi dan budaya (Norshahril, 2015). Nahdlatul Ulama, merupakan komunitas yang didalamnya banyak para Kyai yang memiliki ikatan yang kuat terhadap tradisi keagamaan yang mempunyai karakter tersendiri. Selain itu berdirinya Nahdlatul Ulama adalah sebagai penyeimbang dan penyelaras terhadap munculnya gerakan Islam sebelumnya yang mengusung pembaharuan Islam (Su'adi, 2014: 53). Nahdlatul Ulama yang didirikan memiliki beberapa tujuan, anatara lain; *Pertama*, memelastarikan, mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam *Ahlus Sunah Wa al-Jama'ah*. *Kedua*, mempersatukan langkah ulama dan para pengikut-pengikutnya. *Ketiga*, melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat, kemajuan bangsa, dan ketinggian harkat dan martabat manusia (Aswaja An-Nahdiyah, 2007:1).

Pada Putusan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama 2011 dalam Muqodimahya, Sebagai penganut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* Nahdlatul Ulama berkomitmen mewujudkan bangsa yang damai, saling pengertian, maka Nahdlatul Ulama bertekada mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*, *Ukhuwah wathoniyah* dan *Ukhuwah insaniyah* demi kepentingan baik sekala nasional ataupun internasional. Berpegang teguh pada beberapa prinsip : ketulusan, keadilan, moderasi,

keseimbangan (*tawazun*) dan juga toleransi (*tasamuh*) (Putusan Mukhtamar NU 32, 2011:22). Nasionalisme NU dalam proses panjangnya terbentuk antara praktik pengajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan sosial budaya Indonesia. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi logis dari pemikiran tradisional NU (Nafi'a, 2009). Dengan Islam Nusantara-nya NU ingin mengingatkan kepada umat Islam akan perannya dalam melindungi tradisi Islam lokal Indonesia dalam menghadapi arus ideologi Islam yang radikal (Norshahril, 2015) Selain itu para kalangan NU juga menganggap hal tersebut juga sebagai upaya memerangi radikalisme dan terorisme (Arifianto dan Wanto, 2015).

Pada tahun 2011, BNPT dan Nahdlatul Ulama melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut berisi tentang kerjasama program kontra-radikalisasi dan juga deradikalisasi (Zuhri, 2017: 124). Maka dalam hal ini seperti yang disampaikan Oleh ketua PBNU, K.H. Said Aqil menyampaikan bahwa NU akan ikut berperan serta dalam program deradikalisasi yang bekerjasama dengan Kementerian POLHUKAM dan juga BNPT (Kompas, 31 Maret 2016). Pada kesempatan itu pula, Presiden Jokowi menyatakan kepercayaannya pada NU sebagai ormas yang memegang prinsip *tasamuh* dan moderat ikut terlibat dalam program deradikalisasi (Tempo, 31 maret 2016).

Nahdlatul Ulama yang berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah* berusaha membangaun pemahaman keagamaan yang pluralisme dan inklusif. Konsekuensinya, Nahdlatul Ulama dituntut agar mampu mengaktualisasikannya dalam berbagai sendi kehidupan dalam masyarakat (Hilmy, 2013:32). Apalagi dengan maraknya aksi sebagian kelompok Islam tertentu yang menggunakan cara-cara radikal telah menempatkan Islam pada umumnya sebagai agama yang melanggengkan Intoleransi dengan kekerasan (Muqqoyidin, 2012:132). Secara Umum Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut serta dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, Nahdlatul Ulama memiliki perhatian besar kepada dunia pendidikan. Madrasah dan pondok Pesantren adalah bukti kontribusi nyata warga Nahdlatul Ulama. Secara substansial ajaran ASWAJA menekankan dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip, *Tawasuth i'tidal*

(Keseimbangan-keadilan), *tassammuh* (toleran), *tawazun* (moderat), dan *amar ma'ruf nahi munkar*. (Mughtar *et.al*, 2007:43). Nilai-nilai yang terkandung dalam materi Aswaja dan Ke-NU-an kemudian, dijadikan sebagai media penangkal doktrin radikal. Hal tersebut juga di aktualisasikan Nahdlatul Ulama dalam berbagai bidang sosial kemasyarakatan salah satunya melalui pendidikan. Pada tataran ini pendidikan Aswaja disekolah NU dikembangkan melalui pendidikan Islam seperti Ke-Nu-an dan juga pelajaran ASWAJA. Kedua materi tersebut mengembangkan pelajaran yang isi materinya mengajarkan beberapa aspek yaitu: *Tawasut* (Moderat) yaitu mengajarkan pada spirit perdamaian serta mengedepankan sikap tengahan dalam mencari solusi terbaik dalam pertentangan yang terjadi. *Tawazun* (berimbang) yaitu berimbang dalam mengintegrasikan dan mensinergikan dalil-dalil untuk menghasilkan keputusan yang bijak terutama dalam keberagaman. Hal itu, menjadikan materi ASWAJA ingin menumbuhkan kemampuan dalam meredam konflik baik dalam internal Islam maupun eksternal Islam (Naim, 2015:79-80).

Berdasarkan Peraturan dan Pedoman LP Ma'arif NU, Kerangka dasar operasional dan struktur kurikulum Satuan Pendidikan Ma'arif mengacu pada ketentuan Sidiknas dengan diperkaya materi pembelajaran *Ahlussunnah Waljam'ah* (Aswaja), Ke-Nu-an, dan kearifan lokal. Sebagai kesatuan integral dalam struktur kurikulum, materi Aswaja dan Ke-NU-an memiliki fungsi, sebagai pedoman dan acuan peserta didiknya dalam menjalankan ajaran Islam. Selain itu, materi tersebut juga berusaha membangun dan mengembangkan bagaimana menjadi muslim yang bertaqwa dan berakhlak mulia sebagai anggota maupun individu dalam masyarakat dengan ajaran Islam yang berhaluan *Ahlussunnah wal jama'ah* (Siroj, 2015: 94-96)). Dari rumusan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU tersebut kita dapat melihat Nahdlatul Ulama dengan ideologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* seperti konsep *tasamuh* (toleransi), *tawassut* (moderat), *tawzun* (seimbang) juga dikembangkan melalui kultur pendidikan mereka. Sehingga mata pelajaran Aswaja dan Ke-Nu-an, merupakan bentuk instrumen yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengahan (LP Ma'arif NU,

2014:35-38). Model pendidikan inilah yang kiranya menjadi salah satu instrumen Nahdlatul Ulama untuk menyemaikan karakter Islam moderat

KESIMPULAN

Kebutuhan untuk mentransformasikan nilai-nilai serta sikap hidup damai di lingkungan pendidikan khususnya pendidikan Islam dirasa penting dalam upaya melawan paham dan perilaku yang menghalalkan kekerasan seperti terorisme dan radikalisme agama. Seperti yang kita ketahui Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki lembaga pendidikan yang tersebar diseluruh Indonesia. Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, memiliki ciri khas utama adanya pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahannya, yang memuat materi-materi nilai-nilai perdamaian serta menyemai karakter Islam yang moderat, Islam yang berkemajuan bagi para anak didiknya. Dilain sisi, Nahdlatul Ulama lembaga pendidikan Ma'arif NU mempunyai ciri khas tersendiri seperti pendidikan ASWAJA dan juga Ke-NU-an yang dirancang didalamnya mengusung Islam yang moderat dengan ideologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* seperti konsep *tasamuh* (toleransi), *tawassut* (moderat), *tawzun* (seimbang) dikembangkan melalui kultur pendidikan mereka, sebagai bentuk instrumen yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengahan.

Kajian ini juga membuktikan bahwa, Muhammadiyah dan Nahlatul Ulama ikut berperan aktif walaupun dengan cara dan strategi masing-masing. Pada tataran konseptual terkait deradikalisasi paham keagamaan, memang berbeda hingga pada teknik operasionalnya dilingkungan masing-masing. Namun pada intinya, sekolah dari platform masing-masing menjadi lahan untuk membangun

karakter siswa agar mampu bersikap toleran, cinta damai, dan Islam yang selalu dinamis mampu membaca peta zaman dengan memahami, membandingkan dan perenungan atas realitas yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Materi-materi yang disajikan memberikan pemahaman terhadap keragaman disekitar kita dan memunculkan sikap positif dengan kelompok yang berbeda.

Tabel 1.1:

Konsep Deradikalisasi Paham Keagamaan Serta Implikasinya terhadap Pendidikan Islam

<p>BNPT</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Konten program deradikalisasi terdapat tiga ranah yang salah satunya ranah wawasan keagamaan. Pada ranah ini BNPT menggandeng ulama-ulama, tokoh-tokoh dan ormas-ormas Islam melakukan dialog dan pengajian untuk mempertemukan konsep paham keagamaan dna paham kebangsaan. - Sebagaimana diatur dalam Perpres N0. 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mentransformasikan wawasan kebangsaan dan keagamaan yang inklusif dalam kurikulum. Peningkatan kapasitas pendidikan keagamaan penguatan eksistensi pesantren. - Selain itu sesuai dengan Perpres No. 46 tahun 2010 BNPT dalam Pasal 36, bentuk kebijakan BNPT dengan pelibatan ormas-ormas keagamaan yang mempunyai pemikiran keagamaan yang moderat dapat dianggap sebagai metode mengurangi dampak dan mengurangi gerakan radikalisisi agama. Hal tersebut turut mempengaruhi keberhasilan program tersebut.
<p>Muhammadiyah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Moderasi (Moderat), Islam Berkemajuan dan <i>Ahl Ahdi Wa Syahadah</i> - Perbedaan pandangan Muhammadiyah dalam konsep deradikalisasi bukan berarti menyetujui terorisme, tetapi Muhammadiyah lebih melihat dengan sudut pandang obyektif dan koprehensif dan menentukan strategi yang lebih tepat. - Muhammadiyah yang menolak ikut masuk dalam program deradikalisasi bukan berarti menyetujui gerakan radikal, Muhammadiyah lebih memilih konsep moderasi dalam menyikapi para kelompok radikalisisi dan radikalisme agama.

	<p>Muhammadiyah ingin jalan dialogis menjelaskan konsep jihad secara menyeluruh sehingga tidak terjadi salam dalam memahami maupun disalahgunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammadiyah dalam upaya ikut serta menanggulangi radioklisasi agama, Muhammadiyah dalam hal ini salah satu cara Muhammadiyah dalam menyemaikan ideologi Islam moderat adalah melalui Pendidikan Islam yang moderat dan Islam yang berkemajuan yang ditransformasikan dalam penyampaian materi-materi pada lembaga-lembaga pendidikan dibawah naungan Muhammadiyah seperti pesantren, sekolah tingkat dasar-menengah hingga perguruan tinggi. - Putusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah BAB III mengenai Konsep Pendidikan Muhammadiyah menyebutkan bahwa, Model pendidikan Muhammadiyah didasarkan atas nilai-nilai <i>tasawuh</i> atau <i>moderat</i>. - PP Muhammadiyah No. 3 Tahun 2012 menetapkan selain kurikulum Nasional Muhammadiyah juga menetapkan kurikulum sendiri khususnya dalam pendidikan agama yaitu Kurikulum <i>Al-Islam</i>, Ke-muhamadiyah-an, dan Bahasa Arab. Dengan hal tersebut Muhammadiyah berusaha mentransformasikan nilai-nilai Islam moderat melalui pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah
Nahdlatul Ulama	<ul style="list-style-type: none"> - Konsep Islam Nusantara dan Nasionalisme - pada Muktamar-32 dengan tema Islam Nusantara NU menegaskan, dakwah Islam sejak awal masuknya di Nusantara mengembangkan dakwah yang ber adab, menjunjung tinggi toleransi, yang tetap mengakomodasi budaya dan tradisi keagamaan yang menerapkan nilai-nilai <i>tasamuh</i>. - Dalam sikap kebangsaan mengenai deradikalisasi NU sebagaimana ADART dalam Muktamar NU ke-33 mengisntruksikan agar terpeliharanya perdamaian umat dalam mendinamiskan perkembangan masyarakat dengan selalu menghargai budaya dan tradisi lokal. Hal tersebut, Nahdlatul Ulama beranggapan merupakan bentuk ajaran Islam yang toleran seperti hal nya walisongo dalam mendakwahkan Islam di Nusantara - Secara substansial ajaran ASWAJA dan Ke-Nu-an menekankan dan mengajarkan mengenai prinsip-prinsip, <i>Tawasuth i'tidal</i> (Keseimbangan-keadilan), <i>tassammuh</i> (toleran), <i>tawazun</i> (moderat), dan <i>amar ma'ruf nahi munkar</i>. Nilai-nilai yang terkandung dalam materi Aswaja dan Ke-NU-aan kemudian, dijadikan sebagai media penangkal doktrin radikal.

	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai-nilai Aswaja dan Ke-Nu-an diterapkan dalam seluruh proses pembelajaran, sehingga menjadi pembiasaan dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik. Sebagai kesatuan integral dalam struktur kurikulum, materi Aswaja dan Ke-NU-an memiliki fungsi, sebagai pedoman dan acuan peserta didiknya dalam menjalankan ajaran Islam. - Sehingga mata pelajaran Aswaja dan Ke-Nu-an, merupakan bentuk instrumen yang dilakukan NU dalam mengajarkan Islam yang damai dan toleran, Islam yang tengah sebagai upaya menangkal paham radikal agama.
--	--

Deradikalisasi paham keagamaan menjadi hal penting untuk saat ini dalam rangka penanggulangan terorisme dan radikalisme agama. Sebagaimana telah diungkap diatas secara panjang lebar bagaimana Upaya negara dan juga pelibatan ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menaggulangi terorisme dan radikalisme dalam menjaga keamanan negara, salah satu jalan terbaik dengan deradikalisasi melalui pendidikan agama baik itu sekolah pesantren maupun lainnya.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah radikalisme. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan mitra strategis BNPT dalam menjalankan program deradikalisasi di Indonesia khususnya melalui lembaga pendidikan Islam mereka. Dalam ranah struktural, kedua ormas tersebut mulai dari pimpinan pusat hingga ranting memperkuat Islam yang moderat. Selain itu, secara Kultural mereka bisa mentransformasikan nilai-nilai Islam yang cinta damai, toleransi dan juga Islam tengah, melalui penyampaian-penyampaian materi-materi baik disekolah, pesantren, hingga dimajlis-majlis ilmu yang dibawah naungan kedua ormas tersebut. Melalui instrumen pendidikan Islam mereka, menjadi sebuah lahan yang tepat, dengan ciri khas masing-masing, melalui lembaga pendidikan Islam yang mereka kembangkan masing-masing dari mereka. Sehingga mampu membangun karakter peserta didik dengan pemahaman agama yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Hafal. 2016. “*Youth Deradicalization : Best Practices For Canada*”. A Thesis Master of arts in human Security and Peacebuilding. Canada; Royal Roads University.
- Arifianto, Alexander and Wanto, Adri. “*The 2015 NU Mukhtamar: Further Conservative Turn in Indonesian Islam?*”. RSIS Commentary, No 189- 2 September 2
- Aslam, Othman and Rosili. “*Deradicalization Programs In South-East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs In Malaysia, Thailand, Indonesia and Singapore*”. Journal of Education and Social Science, No. 4. June 2016.
- Azca, Muhammad Najib. “*Yang Muda, Yang Radikal : Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia Pasca Orde Baru*”. MAARIF, Vol. 8. NO. 1. 1 Juli 2013.
- Feddes, Alland R and Galluci Marcello. “*A Literature on Methodology used in Evaluating of Preventive and Deradicalization Interventions*”. Journal For Deradicalization, No. 5 Winter. 15/16
- Hasani Ismail (et.al). 2011. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat; Implikasinya Terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Jakarta; Publikasi SETARA Institute.
- Hilmy, Masdar, “*QUO-VADIS Islam Moderat Indonesia; Menimbang kembali Modernisme Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,*” MIQOT, Vol. XXXVI. No 2. Juli-Desember 2012
- Idris, Irfan. 2017. *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta: Daulat Press
- Jainuri, Achmad. 1992, “*The Muhammadiyah Movement In Twentieth-Century Indonesia : A Socio-Religious Study*”. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University.
- Johnston, Amanda K. 2009. “*Assessing The Effectiveness of Deradicalization programs On Islamist Extremists*”. A Thesis Master of Arts in Security Studies. California: Naval Postgraduate School.
- Luhur, Puthut Ami. “*Konsep Moderasi Muhammadiyah Tangkal Terorisme*”. Suara Merdeka, 3 Mei 2016. <http://berita.suaramerdeka.com/konsep->

[moderasi-muhammadiyah-tangkal-terorisme/](#) Diakses Tanggal 3 Mei 2017.

Masduqi, Irwan. 2012. *Deardikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam Vol.I, Nomor 2. Pesantren Assalafiyah Mlangi Yogyakarta.

Morris, Madeline (*et.al*). 2010. *Deradicalization: A Review of the Literature With Comparison to Findings in the Literatures on Deganging and Deprogramming*. Institute For Homeland Security Solutions.

Muchtar Mashudi (*et.al*). 2007. *Aswaja An-Nahdliyah: Ajaran Ahlusunnah wa al-Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Ulama*. Surabaya: Khalista dan Lajnah Ta'tif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur.

Naim, Ngainun,. "Pengenmbangan Pendidikan Aswaja Sebagai Strategi Deradikalisasi," WALISONGO, Vol. 23. No. 1. Mei 2015

Norshahril. "Nahdlatul Ulama's 33 Congress: Ma'ruf Amin's Rise and its Impact on Indonesia's Traditionalist Islam". *Journal Perspective*, ISEAS Yusof Ishak Institute, No. 48. 2015.

Nurwanto (*et.al*). "Nilai-Nilai Perdamaian dalam Buku Teks Pendidikan Agama Isla (Akhlaq di Sekolah Muhammadiyah)," AFKARUNA: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 11. No. 1 Juni 2013

Othman and Rosili. "Deradicalization Programs In South-East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs In Malaysia, Thailand, Indonesia and Singapore". *Journal of Education and Social Science*, No. 4. June 2016.

Qodir, Zuly. "Pespektif Sosiologis tentang Radikalisme Agam". MAARIF,. Vol. 8. NO. 1, 1 Juli 2013.

Rabasa, Angel. (*et.al*) 2010. *Deradicalizing Islamist Extrimists*. Pittsburgh: RAND Cooperation, National Security Research Division.

Rancangan Program Kerja PP LP Ma'arif Nahdlatul Ulama Periode 2010-2015

Ribas. "Haedar Nashir: Kalau Radikal Dilawan Radikal, Akan Menimbulkan Radikal Baru". *Suara Muhammadiyah*, Senin 9 Juli 2017. <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/07/10/haedar-nashir-kalau-radikal-dilawan-radikal-akan-menimbulkan-radikal-yang-baru/> Diakses Tanggal 3 Mei 2017

Rodin, Dede,. "Fondasi Dan Radikalisme: Telaah atas Ayat-ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an," ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016

- Rokhmad, Abu. "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal". Walisongo., Vol 20, No. 1, Mei 2012.
- Su'adi, Hasan. "40 Hadits Pedoman NU Karya KH. Hasyim Asy'ari (Studi Takhrij dan Analisis Konteks Sosial Keagamaan" JURNAL PENELITIAN, Vol. 11. No. 1, Mei 2014.
- Subarkah, Muhammad. "Haedar Nashir: Muhammadiyah Tidak Akan Masuk Gerakan Deradikalisasi". Republika, Senin, 1 February 2016. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/02/29/o3bfbn385-haedar-nashir-muhammadiyah-tidak-akan-masuk-gerakan-deradikalisasi> Diakses Tanggal 3 Mei 2017.
- Teresia, Ananda. "Jokowi Minta NU Aktif dalam program Deradikalisasi." Tempo, Kamis, 31 Maret 2016. <https://m.tempo.co/read/news/2016/03/31/078758610/jokowi-minta-nu-aktif-dalam-program-deradikalisasi> Diakses Tanggal 3 Mei 2017.
- Zuhdi, Muhammad Harifin. "Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits". RELIGIA., Vol 13, No. 1, April 2010.
- Zuhri, Sarfudin. 2014. *Deradikalisasi Terorisme (Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdlatul Ulama)*. Jakarta: Daulat Press.



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Naskah Publikasi atas nama :

Nama : Aron Gemilang Elyasar
Prodi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam/Fakultas Agama Islam
NIM : 20130720161
Judul : DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN MELALUI PENDIDIKAN ISLAM
Dosen Pembimbing : Nurwanto, MA, M.Ed.

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebagaimana terlampir.
Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ka. Ur. Pengolahan dan Layanan



Laela Niswatin, S.I.Pust.

Yogyakarta, 2018-01-08
yang melaksanakan pengecekan

Istiqlal Yul Fanani, S.Pd



DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN MELALUI PENDIDIKAN ISLAM

by Aron Gemilang

Submission date: 08-Jan-2018 09:58AM (UTC+0700)

Submission ID: 900817897

File name: nal_DERADIKALISASI_PAHAM_KEAGAMAAN_MELALUI_PENDIDIKAN_ISLA1.docx (271.94 K)

Word count: 5683

Character count: 39683

DERADIKALISASI PAHAM KEAGAMAAN MELALUI PENDIDIKAN ISLAM

ORIGINALITY REPORT

6%	6%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.maarif-nu.or.id Internet Source	1%
2	damailahindonesiaku.com Internet Source	1%
3	indonesiatoleran.or.id Internet Source	1%
4	www.aifis-digilib.org Internet Source	1%
5	media.neliti.com Internet Source	1%
6	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
7	Elshimi, Mohammed. "De-radicalisation interventions as technologies of the self: a Foucauldian analysis", Critical Studies on Terrorism, 2015. Publication	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		